

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah diberlakukan sejak dikeluarkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian Undang-Undang tersebut direvisi menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Reformasi keuangan daerah seluruh Indonesia ditandai dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah dengan tujuan pelaksanaan otonomi daerah tersebut secara umum yaitu untuk meningkatkan kemandirian daerah tersebut, untuk memperbaiki akuntabilitas atas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik serta mendorong demokratisasi di daerah (Mahmudi, 2010).

Terciptanya *good governance* serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, maka baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dijelaskan lebih lanjut bahwa Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan

yang setidaknya berisi Neraca, Laporan Realisasi APBN/APBD, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Informasi keuangan yang dilaporkan oleh pemerintah daerah menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas. Salah satu prasyarat untuk dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (pusat dan daerah) adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Mulyana, 2006). Reformasi yang terkait dengan penyajian laporan keuangan daerah ditandai dengan berlakunya Permendagri Nomor 64 tahun 2013, tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Organisasi yang mengelola dana masyarakat harus mampu memberikan pertanggungjawaban pada masyarakat melalui laporan keuangannya. Semakin baik pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan maka akuntabilitas laporan keuangan pemerintah akan meningkat. Untuk meningkatkan akuntabilitas, pemerintah perlu mengakses laporan keuangan yang dibuatnya agar masyarakat dengan mudah memperoleh laporan keuangan tersebut. Karena, akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. (Mardiasmo, 2002).

Selanjutnya, kualitas laporan keuangan dikatakan akuntabilitas jika dapat memenuhi empat karakteristik laporan keuangan yaitu dapat dipahami (*understandability*), relevan (*relevance*), andal (*reliability*), dan dapat dibandingkan (*comparability*). Selain itu, pengelolaan keuangan daerah juga harus adanya aksesibilitas dimana kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Aksesibilitas diatur oleh Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kemendagri dan pemerintah daerah yang bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, Yaitu transparan, efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, serta meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Kemendagri dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas (Mulyana, 2006).

Kemampuan untuk memberikan aksesibilitas dan tingkat pengungkapan laporan keuangan kepada masyarakat atau pengguna laporan keuangan adalah kriteria yang menentukan tingkat akuntabilitas daerah tersebut. Supaya informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangan. Salah satu syarat untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka

kepada publik. Namun, permasalahan yang dihadapi sekarang adalah publikasi laporan keuangan oleh pemerintah nampaknya belum menjadi hal yang umum.

Peran laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial. Sebagai konsekuensinya, penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap dan tidak aksesibel dapat menurunkan kualitas dari akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Penelitian dari Septa Purwaningrum (2018), penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dibuktikan melalui pembagian kuesioner yang telah dilakukan peneliti dengan metode purposive sampling. Penelitian sejenis juga telah dilakukan oleh Rezky Darbianda (2018), dengan variabel independen penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah, sedangkan variabel dependen berupa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Peneliti melakukan penelitian pada Pemerintah daerah Kota Palembang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Peneliti Fikrian (2017), juga telah melakukan penelitian mengenai akuntabilitas laporan keuangan dengan menambah variabel berupa kualitas laporan keuangan, penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan

keuangan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas laporan berpengaruh terhadap akuntabilitas, Semakin berkualitas laporan keuangan maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan semakin baik. Untuk penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Semakin lengkap penyajian laporan keuangan maka akuntabilitas akan cepat terlaksana. Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Semakin tinggi aksesibilitas Laporan keuangan maka akuntabilitas pengelolaan keuangan akan tercapai. Penelitian milik Muhamad Rizafadli (2017), pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan pengungkapan laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dari penelitian di atas, peneliti termotivasi untuk menguji kembali penelitian sebelumnya untuk melihat pengaruh akuntabilitas pada Pemerintah Daerah Kota Kupang karena Pemerintah Daerah Kota Kupang merupakan salah satu entitas yang wajib menyajikan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan sebagai bentuk pertanggungjawabannya.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka topik tentang kualitas laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah penting untuk diteliti mengingat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah yang

diindikasikan melalui seberapa pentingnya pengguna informasi keuangan daerah berimbas pada kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah serta peraturan pemerintah yang mewajibkan laporan keuangan secara lengkap dan mudah diakses.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, menggambarkan belum akuntabilitasnya pemerintah kepada pengguna informasi yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah mengenai pengungkapan informasi keuangan, menjadikan peneliti termotivasi untuk meneliti mengenai **“Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Kupang”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana gambaran kualitas laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kota Kupang?
2. Apakah kualitas laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kota Kupang?
3. Apakah kualitas laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kota Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan rumusan masalah yang telah diuarikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui gambaran kualitas laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kota Kupang?
2. Untuk mengetahui kualitas laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kota Kupang.
3. Untuk mengetahui kualitas laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kota Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain yaitu:

1. Bagi peneliti
Sarana untuk menambah wawasan mengenai kualitas laporan keuangan, aksesibilitas serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan.

2. Bagi Instansi

Sebagai masukan dan gambaran dari pengaruh kualitas laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Kupang.

3. Bagi Lembaga

Sebagai sebuah perkembangan ilmu akuntansi dan untuk menambah pengetahuan mengenai akuntansi pemerintah daerah.